



Peran Partai Politik dalam  
Sebuah Sistem Demokrasi:  
**Sembilan Tesis**

Thomas Meyer

**FRIEDRICH  
EBERT**   
**STIFTUNG**



Peran Partai Politik dalam  
Sebuah Sistem Demokrasi:  
**Sembilan Tesis**

Thomas Meyer

# **Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis**

Penulis: Prof. Dr. Thomas Meyer

Diterbitkan oleh:

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)

Kantor Perwakilan Indonesia

Jalan Kemang Selatan II No. 2A

Jakarta 12730/Indonesia

Tel.: +62-21-7193711

Fax: +62-21-71791358

Email: [info@fes.or.id](mailto:info@fes.or.id)

Website: [www.fes.or.id](http://www.fes.or.id)

Cetakan Pertama, Juli 2008

Cetakan Kedua, Desember 2009

Cetakan Ketiga, Mei 2012

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk foto copy, tanpa izin tertulis dari penerbit

Tidak untuk diperjualbelikan

# Daftar Isi

Kata Pengantar Dr. Hans-Joachim Esderts	6
Kata Pengantar Daniel Sparingga	9
1. Tesis1: Kamajemukan (Pluralisme)	25
2. Tesis2: Peran Penting Parpol	27
3. Tesis3: Penghubung antara Negara dan Masyarakat	30
4. Tesis 4: Fungsi Parpol yang Beragam ('Multiple Functions')	33
5. Tesis 5: Demokrasi dalam Parpol ('Internal Democracy')	34
6. Tesis 6: Struktur Rekahan Masyarakat ('Societal Cleavage Structures')	37
7. Tesis 7: Demokrasi Libertarian atau Demokrasi Sosial	40
8. Tesis 8: Masyarakat Madani	42
9. Tesis 9: Kebutuhan Pemilih untuk Mengkonsentrasikan Suara	44
Kesimpulan	46

# Kata Pengantar

Selama bertahun-tahun Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) berusaha mendukung proses demokratisasi dan reformasi di berbagai bidang (media, politik dan sosial ekonomi) di Indonesia. Salah satu perkembangan terakhir yang sangat mengagumkan, khususnya setejah tumbangny rezirn Orde Baru dan pemerintahan-pemerintahan berikutnya yang lebih demokratis, adalah keberadaan partai politik (parpol) mulai berkembang pesat sehingga bisa bersaing dalam pemilihan umum (pemilu) yang bebas dan adil. Pada tahun 1999 dan 2004, Indonesia telah membuktikan kemampuannya untuk mensukseskan pemilu, untuk memilih wakil rakyat di MPR, DPRD, dan DPD. Tahun 2005, untuk pertama kalinya Indonesia dengan sukses telah melaksanakan pemilihan presiden dan wakilnya secara langsung, disusul kemudian dengan pemilihan kepala daerah secara langsung (PILKADA). Menurut berbagai pihak rangkaian pemilu ini dinilai cukup adil dan bebas serta berjalan dengan rapi.

Dalam konteks pemilu tersebut di atas, parpol harus memenuhi tugas-tugasnya yang maha penting, antara lain: Mempersiapkan kandidat-kanditat terbaiknya di legislatif,

mempromosikan program politik dan platform pemilunya, serta bersaing untuk mendapatkan mandat publik dan suara-suaranya. Tetapi di samping itu dalam jangka yang lebih panjang, parpol harus bisa menjadi perantara masyarakat dengan institusi pemerintahan. Oleh sebab itu, parpol harus terorganisir secara demokratis, memiliki akar yang kuat dalam masyarakat sehingga mampu mereka rnu-larkan demokrasi kepada masyarakat.

Sama seperti parpol di negara-negara lain yang sedang dalam proses transisi dan pemerintahan otoriter ke negara demokratis, kerap kali kita melihat adanya budaya non-demokratis di dalam parpol Indonesia. Pengalaman selama masa pemilu dan sesudahnya menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan untuk mempromosikan demokrasi dengan menjelaskan peran dan fungsi parpol, bagaimana mereka mengatur dirinya sendiri.

Dalam buku kecil ini, Prof. Thomas Meyer berusaha menjelaskan peran dan fungsi parpol secara sistematis. Kami berharap buku kecil ini mampu memberikan pemahaman mengenai konsep yang mendasari semua partai politik dan anggota partai.

Dr. Hans-Joachim Esderts  
Jakarta, Februari 2006





## Kata Pengantar

### Partai Politik dan Transisi Demokrasi

#### Daniel Sparringa

*Sosiolog, Universitas Airlangga*

*Wakil Ketua Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID)*

Harus diakui bahwa ketika beberapa elemen kritis di negeri ini mendorong terjadinya reformasi untuk demokrasi, tidak banyak dari mereka yang membayangkan bahwa perubahan ini akan membawa akibat yang sangat penting pada peran partai politik. Walaupun secara umum berkembang kepercayaan bahwa demokrasi memerlukan sebuah infra-struktur politik baru, kebanyakan orang di negeri ini kurang berhasil mengembangkan perspektif baru yang memadai selain dari pemilihan umum yang bebas. Adalah jelas bahwa pemilihan umum yang bebas merupakan syarat penting dalam demokrasi. Sama pentingnya dengan itu tentu saja adalah membangun partai politik yang efektif.

Percakapan untuk mendorong perubahan yang pada awalnya terjadi di kalangan yang relatif terbatas ini mendapatkan momentum yang penting ketika “reformasi” dipakai sebagai istilah yang dipercaya sebagai mewakili kehendak publik yang lebih luas untuk menuntut sebuah

perubahan politik yang lebih mendasar. Dalam waktu yang relatif sangat cepat terjadi perubahan yang sangat penting: percakapan berubah menjadi sebuah gerakan yang lebih masif walaupun kurang terorganisasi, agenda reformasi berubah menjadi aksi jalanan menuntut perubahan, dan pada akhirnya wacana akademis berubah menjadi praktik yang dilembagakan.

Sangat penting untuk dicatat di sini bahwa, dalam observasi saya, wacana dominan tentang “reformasi” yang merupakan fenomena elektrik di sepanjang akhir 1997 dan sepanjang 1998 itu pada umumnya mengasumsikan masalah terpokok bagi sebuah perubahan di Indonesia terdapat pada negara (*state*) dan bukan masyarakat (*civil society*). Kekuasaan yang korup, sentralistis, dan abai terhadap hak-hak sipil dan politik rakyat, misalnya, dipandang sebagai sumber utama dari berbagai persoalan di Indonesia.<sup>1</sup> Anggapan yang sebelumnya sangat dominan berkembang di kalangan elite Orde Baru bahwa masyarakat Indonesia belum siap menerima demokrasi pada umumnya ditolak,

1 Beberapa kalangan menggunakan kata “krisis multidimensional” untuk menggambarkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi negeri ini. Istilah ini terutama dipakai di kalangan mereka yang percaya bahwa Indonesia tidak saja sedang menghadapi krisis politik dan ekonomi melainkan juga hukum dan budaya. Di kalangan yang lebih terbatas, pada awalnya terutama di lingkungan pemimpin keagamaan, juga ditambahkan aspek moral, bahkan dengan konotasi yang paling menonjol.

sekurang-kurangnya diremehkan, oleh para penganjur “Demokrasi Sekarang” (DS).<sup>2</sup>

Para penganjur DS yang terutama berasal dari kalangan aktivis mahasiswa, LSM, intelektual oposisionis<sup>3</sup> (baik yang berasal dari kampus maupun non-kampus) dan sebagian ‘kelas menengah’ yang berasal dari kelompok profesional berbasis urban, pada dasarnya menghendaki perubahan yang bersifat struktural di tingkat negara. Datang dengan gagasan “Reformasi Total”, kelompok ini mengoperasikan gerakan menuntut perubahan melalui tema-tema “demokrasi”, “HAM”, “keadilan”, “*Rule of Law*”, “*Civil Supremacy*”, dan “*clean government and good governance*”. Walaupun sebagian besar tidak percaya pada

- 2 Para pendukung gagasan “Demokrasi Sekarang” pada umumnya memegang kepercayaan bahwa negara Orde Baru dengan sengaja membesar-besarkan potensi disintegrasi sosial melalui wacana politik mereka tentang “SARA”. Bahkan, para pendukung gagasan itu menuding Orde Baru secara sistematis terlibat dalam pelestarian hubungan antagonis di antara elemen-elemen masyarakat majemuk Indonesia.
- 3 Dua kategori intelektual Indonesia lainnya adalah intelektual ortodoks dan intelektual revisionis. Apabila yang disebut terakhir, yaitu intelektual revisionis, percaya pada peran normatifnya sebagai “guru”/ “pandhito” yang berbicara dalam bahasa “orang bijak”, intelektual ortodoks sangat percaya pada peran normatifnya sebagai “formulator” gagasan-gagasan tentang pembangunan—bekerja sebagai staf ahli atau konsultan pemerintah. Daniel Sparringa, 1999, “Taksonomi Intelektual Indonesia” (*working paper*, Laboratorium Masalah-masalah Pembangunan, FISIP Universitas Airlangga).

revolusi, mereka menghendaki upaya-upaya yang cepat bagi pemulihan demokrasi di Indonesia yang menjadi inti dari “Indonesia Baru” itu.

Tentu saja, saya sendiri tidak menampik seriusnya persoalan yang terdapat pada negara Orde Baru sebagaimana dinyatakan secara nyaring oleh para pendukung pembaharuan politik sejak pertengahan 1970. Walaupun demikian, saya kira, adalah sangat menyederhanakan persoalan yang sesungguhnya apabila yang dibayangkan hanyalah sekedar berhubungan dengan sentralisme kekuasaan di tangan Presiden Soeharto yang menghasilkan struktur politik yang monolitik dan yang pada gilirannya juga menghasilkan korupsi atas kekuasaan dan pengabaian terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara. Dalam pemahaman sosiologi politik saya, keseriusan atas kesalahan yang bersifat struktural yang terjadi sebelumnya, bahkan sebelum Orde Baru, terutama berkenaan dengan tidak hadirnya sebuah disain kelembagaan negara moderen yang menjamin terdapatnya pemisahan dan pembagian kekuasaan yang jelas di antara empat hal pokok: (1) kekuasaan judisial-eksekutif-legislatif (YEL); (2) pemerintah pusat-daerah; (3)

4 Saya percaya pada pemikiran sentral yang menempatkan persoalan bagaimana kekuasaan itu dikelola sebagai salah satu elemen penting dalam demokrasi. Inti dari perspektif semacam itu pada pokoknya mensyaratkan pencegahan terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan satu lembaga dan karena itu mendiktekan hadirnya mekanisme yang memungkinkan prinsip check and balances di antara lembaga-lembaga

wilayah negara-masyarakat, dan (4) kekuasaan komunal-individual<sup>4</sup>.

Karena itu, dalam pemahaman saya, Orde Baru adalah produk yang tidak terhindarkan dari sebuah sistem politik yang kita ciptakan sendiri melalui Undang-undang Dasar 1945 sebelum diamandemen dan melalui institusionalisasi penafsiran atas doktrin dominan tentang ajaran bernegara dari Soepomo yang sangat menekankan hubungan yang bersifat integralistik di antara elemen-elemen di dalam dan di antara negara, masyarakat, dan pasar. Dengan kata lain, kedua hal itu, yakni konstitusi dan penafsiran ajaran negara integralistik lah yang memberi peluang pada berkembangnya sistem politik yang di antaranya menghasilkan sebuah sistem kepemimpinan nasional yang sangat hegemomik yang terjadi selama periode Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno dan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.

Untuk banyak hal, sistem politik Orde Baru menjadi mungkin berkembang dan untuk waktu yang lama dapat dipertahankan terutama karena tiadanya *civil society* yang kuat. Di antara sekian banyak masalah yang diha-

negara dan pengawasan masyarakat terhadap negara berdasarkan kerangka umum “rakyat berdaulat”. Untuk uraian lebih lanjut lihat: Daniel Sparringa, 2004, “Demokrasi: Konsepsi dan Praktik” (Sebuah Tinjauan Sosiologi Politik tentang Perkembangan Demokrasi dan Negara-Bangsa Indonesia), **Nasion**, 1: 19-38.

dapi oleh *civil society* di Indonesia, tiadanya partai-partai politik yang berakar barangkali adalah masalah yang paling serius. Sangat sulit untuk dibantah bahwa untuk waktu yang lama, tiadanya partai politik yang efektif di Indonesia telah mengakibatkan berbagai kesulitan yang luar biasa untuk melembagakan sebuah pola perubahan yang secara politik tidak saja terlembaga namun juga demokratis.

Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen selama periode parlemen 1999-2004 yang dihasilkan oleh Pemilu 1999 mengubah banyak aspek dari hubungan tata-kenegaraan kita. Perubahan yang terjadi itu ditandai oleh beberapa hal, di antaranya yang terpenting adalah, **pertama**, parlemen terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). **Kedua**, seluruh anggota parlemen dipilih melalui pemilu yang berimplikasi pada diakhirinya sistem pengangkatan dan penunjukan anggota TNI/Polri dan perwakilan utusan golongan sebagai anggota parlemen. **Ketiga**, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. **Keempat**, dibentuknya lembaga independen penyelenggara pemilu yang bebas dari pengaruh pemerintah. **Kelima**, pembentukan Mahkamah Konstitusi yang di antaranya memiliki kewenangan *judicial review*. **Keenam**, hadirnya sistem kepartaian jamak (*multi-party system*). Masih banyak yang dapat ditambahkan, di antaranya adalah, konstitusi baru juga memberikan dasar yang kuat pada pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, media bebas, dan otonomi yang lebih luas bagi daerah-

## Sembilan Tesis

daerah di Indonesia.

Dapat dikatakan bahwa perkembangan kelembagaan selama lima tahun pertama transisi demokrasi di negeri ini (1999-2004) telah dihasilkan perubahan yang sangat penting. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa banyak orang sangat puas dengan hasilnya pada tingkat praktik. Ketidakpuasan publik pada umumnya berhubungan dengan persepsi tentang meluasnya praktik korupsi di kalangan birokrasi pemerintah dan DPR (pusat dan daerah) serta persepsi tentang ketidakcapakapan pemerintah untuk secara segera memulihkan perekonomian nasional sebagai akibat dari lemahnya penegakan hukum yang dapat menjamin ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat. Tentu saja masih banyak hal lain yang dapat disebut di sini, di antaranya yang terpenting adalah tentang masa depan transisi ini.

Hingga akhir periode lima tahun pertama transisi demokrasi terdapat sejumlah pertanyaan pokok yang berkembang di kalangan masyarakat yang menyiratkan tidak saja keprihatinan terhadap apa yang mereka lihat selama masa itu namun juga mencerminkan kegelisahan mereka tentang masa depan Indonesia. Menurut saya, kegelisahan itu pada umumnya berkisar di sekitar persoalan tentang (1) seberapa cepat perubahan yang nyata itu akan terjadi, setidaknya-tidaknya dalam arahnya yang menjanjikan?; (2) seberapa mungkin perubahan itu dapat dilakukan dengan 'guncangan' yang mereka dapat me-

nanggungnya lagi?; (3) seberapa masuk akal harapan terhadap perubahan itu digantungkan kepada para pemimpin mereka?; (4) seberapa siap infrastruktur yang terdapat dalam masyarakat untuk ikut menentukan arah perubahan itu?; dan (5) bagaimanakah 'masa lalu' itu hendak diselesaikan?

Respon masyarakat terhadap pertanyaan-pertanyaan itu pada umumnya mengabarkan kerisauan dalam ihwal bagaimana mereka semestinya mem(p)osisikan dirinya terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Miskinnya pemahaman dan kepercayaan bahwa masyarakat sesungguhnya dapat menjadi bagian yang berarti dalam proses perubahan itu, dalam hemat saya, telah mengecilkan potensi bagi berkembangnya kesadaran kolektif yang penting bagi sebuah perubahan yang berpola partisipatoris. Keragu-raguan bahwa para pemimpin mereka sedang bekerja dalam arah yang menjanjikan juga menimbulkan rasa frustrasi dan meningkatkan kecemasan tentang ada tidaknya masa depan yang lebih baik itu.

Di samping berkembangnya perasaan-perasaan alienasi yang meluas terhadap proses perubahan dan struktur yang memfasilitasi perubahan itu, kebanyakan dari mereka memiliki kepercayaan yang tidak jelas terhadap bagaimana perubahan itu harus dilakukan—dari mana memulainya?, siapa yang semestinya mengambil prakarsa?, mana yang harus diubah dan mana pula yang sebaiknya dipertahankan?, dengan ongkos apa dan berapa besar? Dan tentu



## Sembilan Tesis

saja, siapa yang menanggungnya?

Apabila terdapat rasa percaya yang berlebihan ketika reformasi pada awalnya digulirkan, yang tampak menonjol pada periode 1999-2004 itu adalah kehilangan rasa percaya diri itu. Pada umumnya terdapat suasana untuk menghindari perdebatan tentang bagaimana masyarakat harus mengambil posisi terhadap perubahan itu. Apa yang tampak menonjol justru hasrat yang besar untuk melihat bahwa perubahan itu akan datang dengan sendirinya, pada waktunya.

Walaupun tidak mudah untuk merumuskan perasaan-perasaan yang mewakili keprihatinan masyarakat luas itu, saya menangkap kesan yang amat kuat bahwa masyarakat melihat adanya kesenjangan yang besar di antara apa yang mereka lihat dan alami pada masa itu dan gambaran yang mewakili harapan mereka sebelumnya tentang reformasi. Menurut saya, akibatnya sangat buruk. Banyak orang di negeri ini menjadi tidak sabar dengan perubahan ini dan bertanya-tanya tentang “ke mana semua kekacauan ini akan berakhir”. Liberalisasi politik yang diletakkan dasarnya sebelumnya oleh Presiden Habibie dan yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Abdurahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri sering dipersepsi sebagai hanya menghasilkan frustrasi sosial yang luas—sebuah kondisi yang dilihat oleh banyak orang sebagai cocok untuk menghasilkan kehendak untuk kembali ke sistem politik lama.

Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Adakah kece-  
masan bagi berkembangnya ketidakpuasan terhadap tran-  
sisi demokrasi ini sebagai sungguh mencerminkan keadaan  
yang sebenarnya atautkah sesuatu yang agak dilebih-lebi-  
hkan? Penjelasan banyak orang tentang isu ini memang  
bermacam-macam. Di kalangan para aktivis pro-demokra-  
si 70-an, terdapat kecenderungan untuk percaya bahwa  
apa yang sedang terjadi ini merupakan proses pencarian  
keseimbangan baru. Sebuah proses yang walaupun penuh  
guncangan dipercaya akan diakhiri dengan hadirnya se-  
buah harmoni baru yang terutama ditandai oleh terjadinya  
konsensus tentang bagaimana sebuah sistem politik baru  
hendak dikelola secara kolektif. Dalam pandangan mereka,  
misalnya Rahman Toleng dan Nurcholis Madjid, diperlu-  
kan waktu 20 hingga 25 tahun lagi untuk menghasilkan  
demokrasi yang lebih stabil.

Sementara itu, aktivis pro-demokrasi 90-an mema-  
hami persoalan itu sebagai perwujudan kegagalan elemen-  
elemen strategis dalam civil society untuk melakukan kon-  
solidasi secara cepat dalam transisi ini. Dalam pandangan  
mereka, kaum reformis dalam keadaan terpecah belah dan  
tidak sepenuhnya siap untuk mengambil posisi baru terha-  
dap situasi baru. Sangat sedikitnya kaum reformis untuk  
terlibat secara aktif dalam partai-partai politik dan men-  
jadi bagian penting dalam parlemen adalah contoh yang  
umum dipakai untuk menjelaskan kecenderungan itu.  
Reformasi politik di tingkat negara, oleh kalangan ini, di-

lihat hanya menghasilkan lembaga-lembaga baru melalui undang-undang baru. Hasilnya hanyalah sebuah praktik demokrasi yang berdasarkan pada formalitas, mekanisme, dan prosedur politik untuk memperebutkan kekuasaan daripada sekaligus sebuah tradisi baru dalam demokrasi. Dalam bentuk yang lebih sinis, mereka bahkan menuduh para aktor politik dominan yang sebagian besar terdiri atas mereka yang berada di parlemen sebagai telah membajak demokrasi; memakai tatacara demokrasi untuk tujuan dan kepentingan mereka sendiri: kekuasaan, jabatan, dan uang.

Di kalangan para analis politik, transisi demokrasi selama lima tahun di Indonesia ditandai oleh apa yang mereka konseptualisasikan dengan istilah “demokrasi yang mengalami defisit”. Salah satu bagian terpenting dari analisis tentang ihwal ini menyoroti peran partai politik yang dianggap kurang serius menjalankan agenda reformasi untuk tujuan demokrasi. Secara umum, partai-partai politik di Indonesia menjadi kehilangan orientasi ideologisnya yang sejati bagi sebuah perubahan yang bermakna. Para

- 5 Dalam pemahaman saya, sekurang-kurangnya terdapat delapan aliran ideologis yang tengah bersaing dalam masa transisi ini. Prosesnya sendiri masih jauh dari selesai dan banyak ditandai oleh proses afiliasi-disafiliasi yang terus berubah sampai sekurang-kurangnya dalam 20 tahun mendatang. Delapan aliran ideologi itu, untuk sebagian merupakan sebuah perkembangan yang akhirnya dapat ditelusur kembali pada perkembangan politik di Indonesia tahun 50-an, atau

elite partai sering terlibat dalam perdebatan yang ditandai oleh bercampurnya secara tidak jelas konflik ideologis (*ideological battlefield*) dan perebutan kekuasaan (*power struggle*)<sup>5</sup>. Keduanya bercampur, sering sangat manipulatif karena menggunakan tema ideologis untuk sebuah tujuan yang sangat politis, yakni kekuasaan untuk kekuasaan.

Alih-alih menjadi bagian yang produktif dari transisi ini, kebanyakan partai politik berubah menjadi alat kekuasaan bagi sekelompok kecil pengurusnya, jatuh sebagai kendaraan politik untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok perorangan yang bergabung dengan partai politik dengan dan untuk motif yang tidak berkaitan sama sekali dengan tujuan reformasi yang bermuara pada kepentingan perubahan untuk sebuah Indonesia yang lebih demokratis, adil dan sejahtera. Salah satu implikasi penting dari proses ini adalah menurunnya fungsi representasi dari partai politik dan bahkan parlemen—terjadi justru ketika pemilihan umum berlangsung lebih demokratis. Implikasi lainnya yang datang segera dan sangat serius adalah meningkatnya ketidakpercayaan publik pada partai politik.

bahkan sebelumnya. Kedelapan aliran ideologi itu adalah: Islam Kutural, Islam Politik, Nasionalis-Populis, Nasionalis-Negara, Nasionalis Ortodoks, Pragmatis-Teknokratis, Demokrasi Liberal, dan Demokrasi Sosial. Lihat: Daniel Sparringa, 1998, "Kompetisi Aliran Ideologi Pasca Orde Baru" (*working paper*, Laboratorium Masalah-masalah Pembangunan).

Saya kira, tidak sepenuhnya adil mengatakan bahwa buruknya kinerja partai politik selama periode 1999-2004 itu melulu disebabkan oleh motif yang sepenuhnya politis. Dalam pandangan saya, banyak partai politik selama periode lima tahun pertama reformasi itu kurang memiliki peralatan ideologis, politik, dan organisasional yang memadai untuk memahami dan menjalankan peran strategis mereka sebagai lembaga politik yang sangat penting dalam demokrasi. Secara umum, dapat dikatakan bahwa masalah terpokok yang dihadapi oleh partai-partai politik di Indonesia berhubungan dengan lima isu utama: (1) kapasitas organisasional (seperti misalnya kemampuan memobilisasi dan mengelola sumber-sumber finansial, personel, dan material); (2) memelihara integrasi (seperti misalnya kemampuan mencegah perpecahan internal sebagai akibat dari hadirnya perbedaan dalam tubuh partai); (3) mempraktikkan demokrasi secara internal (misalnya menegakkan mekanisme yang demokratis dalam pengambilan keputusan penting); (4) kemampuan memenangkan pemilu (seperti misalnya dalam menentukan isu-isu kampanye dan rekrutmen kandidat anggota parlemen), dan; (5) pengembangan ideologi partai (seperti misalnya dalam menentukan posisi partai terhadap isu-isu strategis yang berkembang dalam masyarakat.

Potret dari kebanyakan partai politik di Indonesia selama masa itu pada umumnya ditandai oleh hadirnya masalah yang serius hampir di semua isu itu: dari kapa-

sitas organisasional hingga ideologi. Akibatnya sangat jelas, alih-alih menjalankan fungsi mediasi dan moderasi kepentingan konstituen, pendidikan politik, dan rekrutmen elite, kebanyakan partai politik lebih sibuk bertikai satu sama lain dan, lebih buruk dari itu, bertikai di antara mereka sendiri sesama anggota partai di hampir setiap kali mereka harus membuat kebijakan penting partai.

Peristiwa di sekitar suksesi kepemimpinan partai menjadi ilustrasi yang baik untuk menggambarkan kuatnya kecenderungan partai sebagai ajang pertarungan kepentingan pemimpinnya. Kepemimpinan partai politik menjadi kian sulit dipisahkan dengan pribadi-pribadi yang menjadi pemimpinnya. Dengan kata lain, kebanyakan partai politik mengalami proses personalisasi melalui pemimpinnya. Pembaharuan dari dalam, termasuk di antaranya ketika menyentuh pertanyaan tentang kepemimpinan, menjadi tidak mudah dilakukan. Partai-partai politik semacam itu menjadi tidak lagi bersifat terbuka pada gagasan-gagasan alternatif yang mendorong perubahan dari dalam. Bahkan, dalam banyak kasus, mekanisme pengambilan keputusan penting di dalam organisasi sering mengabaikan prinsip-prinsip utama yang dijunjung tinggi dalam demokrasi. Untuk menambah sedikit keruwetan yang telah ada, proses-proses penting dalam isu rekrutmen dan sirkulasi elite sangat diwarnai oleh kuatnya praktik-praktik manipulatif. Di atas semua itu, cukup banyak partai yang gagal mengembangkan identitas partai secara jelas karena tidak

memiliki landasan ideologi yang kuat dan mengakar. Gambaran ini dengan jelas telah mengakibatkan kebanyakan partai di Indonesia itu memiliki potret diri yang agak jauh dari gambaran sebuah partai moderen.

Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Thomas Meyer ini jelas dapat menjadi salah satu jawaban penting dari usaha untuk menemukan jalan keluar yang dihadapi oleh partai-partai politik di Indonesia. Secara ideologis, gagasan dasar tentang demokrasi sosial—yang di Indonesia lebih populer disebut dengan istilah SOSDEM (sebuah singkatan yang diambil dari istilah *Social Democracy*)— yang mewarnai pemikiran penulisnya sesungguhnya tidak sepenuhnya baru dalam sejarah pemikiran politik di Indonesia. Gagasan tentang pentingnya peran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat telah lama menjadi pemikiran utama dari pendiri negara. Bahkan, penegasan tentang tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak ekonomi, sosial, dan kultural rakyat dengan jelas disebut dalam Undang-undang Dasar 1945, baik yang belum maupun yang telah diamandemen. Secara kultural pun, gagasan tentang tanggung jawab sosial yang lebih luas juga memiliki akar yang kuat, baik dalam pemikiran maupun praktik sosial di negeri ini.

Oleh karena itu, seperti yang diimplikasikan oleh penulisnya dalam buku ini dan buku-buku lainnya yang juga telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam lima tahun belakangan ini, demokrasi sosial sesungguhnya bu-

kankah sebuah ideologi dalam maknanya yang dogmatik itu. Sebaliknya, demokrasi sosial adalah agenda perubahan yang di dalamnya memuat berbagai peta jalan (*road map*) yang menuntun kita dalam menghasilkan aksi dan program nyata yang menjawab kebutuhan dasar dari sebuah sistem politik yang demokratis dan berkeadilan ekonomi, sosial, dan kultural. Di tempat seperti inilah peran partai politik menjadi sangat penting.

Dalam kepercayaan saya, buku ini menjadi istimewa karena menawarkan gagasan terobosan yang sebagian besar pemikiran dasarnya mencerminkan jalan keluar dari persoalan yang dihadapi oleh partai-partai politik di Indonesia. Semoga buku ini dapat menggerakkan lahirnya pemikiran-pemikiran kritis, dan akhirnya praktik-praktik baru yang dapat mengkoreksi kesalahan yang bersifat mendasar demi dihasilkannya sebuah bangunan masyarakat dan negara yang bertumpu pada gagasan demokrasi sosial yang berpendekatan pada kemakmuran dan keadilan politik, ekonomi, sosial, dan kultural.



### Tesis 1:

# Kemajemukan (*Pluralisme*)

Setelah hak dasar politik dilembagakan dan orang-orang diberi kebebasan untuk mengekspresikan kepentingan, nilai-nilai, dan pendapat mereka, di dalam masyarakat akan muncul berbagai kelompok kepentingan. Proses demokrasi *mengakomodasi*\* keberagaman semacam ini dengan menawarkan peraturan (aturan main) dan norma.

Peraturan dan norma tersebut menjadi landasan bagi konsensus *mayoritas*\* dari berbagai kepentingan dan nilai yang ada. Inilah inti dari proses politik dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Kemajemukan kepentingan dan nilai bukan saja tidak terhindarkan tetapi juga sah selama semua pihak masih menghormati *legitimasi*\* dari

\* Akomodasi: Memberi tempat dan kesempatan agar sesuatu berkembang.

\* Konsensus mayoritas: Kesepakatan atas dasar suara terbanyak.

\* Legitimasi: Keabsahan suatu lembaga atau perorangan yang didapatkan karena dukungan masyarakat luas.

lembaga demokrasi dan hukum yang ada.

Fungsi dasar dari sebuah partai politik (parpol) adalah untuk *mengagregasikan\** kepentingan masyarakat, mengarahkannya pada kepentingan bersama, dan merancang-nya dalam bentuk *legislasi\** dan kebijakan, sehingga menjadi sebuah *agenda\** yang bisa mendapatkan dukungan rakyat di saat pemilihan umum.

Parpol merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi modern. Tantangannya adalah bagaimana cara mengatur parpol dan membuat mereka berfungsi se-cara demokratis.

- \* Agregasi: Mengumpulkan sesuatu hingga berjurnat banyak.
- \* Legislasi: Raneangan undang-undang.
- \* Agenda: Vial yang akan dicapai oleh suatu partai politik.

### Tesis 2:

# Peran Penting Parpol

Organisasi yang berperan dalam proses *formulasi*\* kepentingan antara lain adalah sektor perantara (*intermediary sector*) dan masyarakat madani (*civil society*). Sektor perantara menghubungkan suatu masyarakat dengan sistem politik mereka. Contohnya adalah kelompok kepentingan seperti serikat pekerja, asosiasi pengusaha, organisasi profesi, kelompok inisiatif warga dan organisasi keagamaan.

Sedangkan dalam masyarakat madani muncul berbagai macam inisiatif yang berkisar pada tujuan dan masalah tertentu seperti lingkungan hidup, hak azasi manusia, gender, dan lain-lain. Salah satu perbedaan antara kelompok kepentingan dan masyarakat madani adalah bahwasanya kelompok kepentingan hanya melayani kepentingan *klien*\* mereka saja, sedangkan masyarakat madani dihar-

\* Formulasi: Penyusunan suatu konsep.

\* Klien: Anggota

pkan merangkul kepentingan masyarakat bersama yang lebih umum.

Dibandingkan dengan kelompok kepentingan dan masyarakat madani, parpol memainkan peran khusus yang tak dapat digantikan oleh organisasi lainnya. Peran penting ini mendudukkan parpol di posisi pusat (*'political centrality'*). Posisi pusat ini memiliki dua dimensi:

1. Setelah berhasil mengagregasikan berbagai kepentingan dan nilai yang ada dalam masyarakat, parpol kemudian *mentransformasikannya\** menjadi sebuah agenda yang dapat dijadikan *platform\** pemilu. Diharapkan platform tersebut mampu menarik banyak suara dari rakyat sehingga parpol akan mendapatkan banyak kursi di *parlemen\**. Selanjutnya parpol harus mampu mem-pengaruhi proses politik dalam *legislasi\** dan *impleinentasi\** program kebijakan publik itu.
2. Parpol adalah satu-satunya pihak yang dapat menerjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat. Hal ini dapat mereka lakukan setelah mereka mendapatkan posisi yang kuat dalam parlemen daerah maupun nasional.

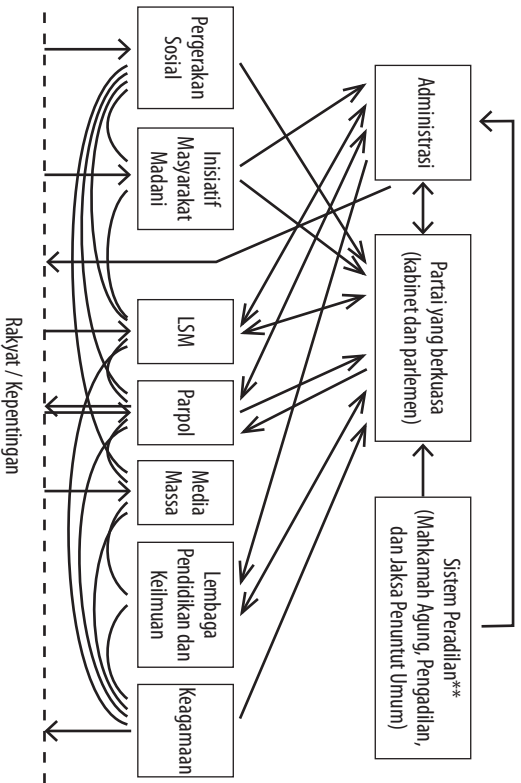
\* Transformasi: Perubahan.

\* Platform: Susunan tujuan dan aksi yang konkrit yang akan dicapai oleh suatu partai politik, biasanya dijabarkan saat kampanye pemilu.

\* Parlemen: Dewan Perwakilan Rakyat.

\* Implementasi: Pelaksanaan undang-undang.

## Demokrasi, Sebuah Pengantar untuk Pelaksanaannya



\* Skema ini hanya menunjukkan hubungan-hubungan utama. Garis lurus menandakan hubungan dalam proses politik. Sedangkan anak panah menunjukkan arah.

\*\* Sistem peradilan tidak dijelaskan dengan rinci. Garis hubungan tidak dicantumkan agar gambar tetap jelas.

Sumber: Ulrich von Alemann "Parteien in der Gesellschaft der Bundesrepublik", dalam A. Mintzel/H. Oberreuter (Hg.), *Parteien in der Bundesrepublik Deutschland*, Bonn dan Oplanden, 1992

## Tesis 3:

# Penghubung antara Negara dan Masyarakat

Partai politik memainkan peran yang menentukan dalam sebuah sistem demokrasi modern dan merupakan pilar utama dalam *pranata*\* sistem politik. Parpol menerjemahkan nilai dan kepentingan suatu masyarakat dalam proses *dari-bawah-ke-atas*\* sehingga nilai dan kepentingan dari masyarakat itu menjadi rancangan undang-undang negara, peraturan-peraturan yang mengikat, dan program bagi rakyat.

Karena partai politik sangat penting untuk pertumbuhan demokrasi, maka di banyak negara terdapat *pendanaan publik*\* bagi parpol. Penyaluran dana publik tersebut dibatasi oleh peraturan dan perundang-undangan yang tegas. Ini menjarnin agar publik bisa ikut mengawasi ang-

\* Pranata: Kelembagaan, institusi.

\* Dari-bawah-ke-atas: Pendesakan suatu masalah dan pemecahannya dari rakyat ke pemerintah, 'bottom-up'.

\* Dana publik: Dana yang dihimpun oleh negara dan pajak rakyat, maupun dari kegiatan ekonomi negara tersebut.

garan parpol. Masyarakat bisa ikut meningkatkan transparansi dalam perilaku serta kinerja sehingga tahu kepada kepentingan siapa parpol berpihak. Dengan demikian kualitas demokrasi dalam suatu proses politik bisa menjadi semakin baik.

Dana publik jumlahnya terbatas dan harus secara tegas diatur oleh undang-undang. Dengan ini diharapkan parpol tidak menjadi tergantung dengan uang dari sektor swasta. Di Amerika Serikat sudah ada banyak contoh di mana banyak parpol yang bergantung pada suntikan dana dari sektor bisnis. Mereka akhirnya menjadi memihak kepentingan dan tekanan tertentu dari sektor bisnis ini.

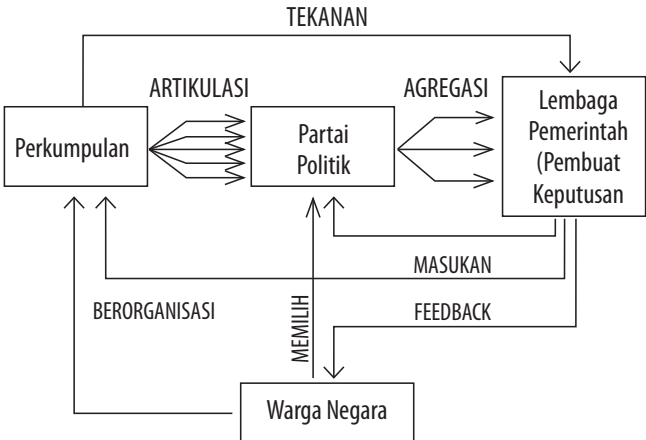
Sedangkan di Jerman, ketergantungan semacam itu *diantisipasi\** dengan memberi dana publik kepada parpol. Partai diharapkan dari sejak awal mengumpulkan uang dari para anggota dan pengikutnya sehingga mereka mengakar dalam masyarakat. Tentu saja konsekuensinya adalah bahwa jumlah dana publik tidak boleh melebihi jumlah dana yang dikumpulkan dari pengikut dan anggota partai politik tersebut. Perbandingan dana publik tergantung jumlah biaya keanggoaan partai dan *dukungan elektoral\** yang berhasil mendapatkannya.

\* Antisipasi: Pencegahan.

\* Dukungan elektoral: Suara pendukung dari rakyat.

Dana publik yang terlalu banyak akan membuat parpol menjadi partai pemerintah. ini akan memutuskan parpol dari akar mereka dalam masyarakat. Sebaliknya, bila dana publik kurang maka partai politik bisa menjadi sangat tergantung pada uang dari sektor usaha swasta. Akhirnya hal ini mengasingkan mereka dari kepentingan dan nilai-nilai masyarakat di mana mereka berakar.

### Partai Politik dan Pemilu





## Tesis 4:

# Fungsi Parpol yang Beragam (‘*Multiple Functions*’)

Di antara banyak fungsi demokratisasi oleh parpol, ada lima yang sangat penting:

1. Mengagregasikan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai dan berbagai kalangan masyarakat.
2. Menjajaki, membuat, dan memperkenalkan kepada masyarakat platform pemilihan umum parpol mereka.
3. Mengatur proses pembentukan kehendak politis (*political will*) dengan menawarkan alternatif-alternatif kebijakan yang lebih terstruktur.
4. Merekrut, mendidik, dan mengawasi staf yang kompeten untuk kantor publik mereka dan untuk menduduki kursi di parlemen.
5. Memasyarakatkan, mendidik, serta menawarkan kepada anggota-anggotanya saluran mana yang efektif bagi *partisipasi*\* politik mereka sepanjang masa antarpemilu.

\* Partisipasi: Keikutsertaan.

Tesis 5:

# **Demokrasi dalam Parpol (‘*Internal Democracy*’)**

Jelaslah sudah bahwa fungsi-fungsi yang telah kita bahas di atas hanya bisa dijalankan bila partai politik juga mengalami proses demokratisasi di dalam tubuh mereka sendiri. Proses itu disebut sebagai demokrasi internal. Setelah syarat ini tercapai maka partai politik yang telah menang pemilu tersebut akan ikut mendukung proses demokrasi dan tidak akan menjadi ancaman bagi pranata demokrasi.

Suatu sistem demokrasi mengharuskan semua partai politik untuk selalu menerapkan demokrasi internal. Hal ini harus diundangkan juga sehingga berjalannya suatu demokrasi internal tidak bergantung pada kemauan baik (*goodwill*) dari pemimpin partai tersebut. Karena bila tidak, demokrasi akan terancam.

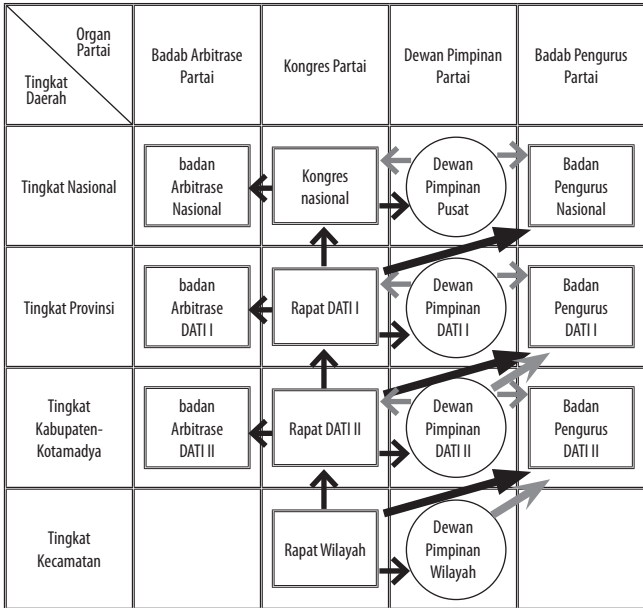
Demokratisasi internal menjamin adanya dialog terbuka dalam proses pembentukan kehendak politik. Dalam

suatu partai politik harus ada sistem pemilu bebas yang memungkinkan pergantian anggota secara adil dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pengadilan publik.

Para pemimpin dan *fungtionaris\** partai memiliki kecenderungan untuk menghimpun kekuasaan di dalam parpol mereka dan pada berebut kekuasaan di luar partai. Demokrasi internal yang berjalan dengan baik akan mengimbangi kecenderungan ini dan menjaga struktur organisasi agar tetap terbuka terhadap kontrol demokratis dan partisipasi anggotanya serta memberikan kesempatan bagi masyarakat madani untuk memberikan pengaruhnya.

\* Fungtionaris: Pemegang jabatan.

### Struktur Internal Partai Politik



→ = Memilih delegasi

→ = Mengirim delegasi

Dikutip dari Nicklauß, 1995, hlm. 127, aslinya diambil dari Bodo, Zeuner

Tesis 6:

# **Struktur Rekahan Masyarakat (*‘Societal Cleavage Structures’*)**

Tujuan jangka panjang sistem demokrasi adalah agar partai politik dapat mencerminkan struktur rekahan sosial dan politik dalam suatu masyarakat. Dengan begitu sistem partai bisa mewakili rakyatnya, memperjelas dasar konflik dalam masyarakat, dan akhirnya menawarkan pilihan-pilihan yang transparan untuk proses pembuatan keputusan dan penyelesaian masalah bagi warga negaranya.

Struktur rekahan masyarakat tertentu sudah umum dikenal di masyarakat Eropa dan sampai sekarang tetap memainkan peran dalam pembentukan kehendak politik. Rekahan tersebut antara lain:

1. Adanya konflik sosial yang mendasar antara pemilik modal dan para pekerja.

2. Adanya konflik antara *politik pusat\** dan *politik pinggir\** akibat dari tidak beresnya proses pembentukan bangsa.
3. Adanya konflik antara sektor pertanian dan sektor industrial (pedesaan dan perkotaan).
4. Adanya konflik antara kepentingan agama dan pendukung *sekularisasi\** dalam politik.
5. Akhir-akhir ini bisa ditambahkan adanya konflik antara pendukung industrialisasi dan pemerhati lingkungan hidup.

Konflik-konflik tersebut bisa saja tumpang tindih sehingga satu pihak yang sama mewakili kepentingan pekerja, sektor industri, dan sekularisme sedangkan pihak yang lain mewakili kepentingan para pemilik modal, dengan orientasi keagamaan tertentu, dan industrialisasi. Cara bagaimana suatu konflik mendasar dalam masyarakat bisa tercermin pada struktur partai politik dan bagaimana seorang warga negara memiliki anggapan yang berbeda dengan warga negara lainnya tentang tinggi rendah *hierarki\** garis rekahan tersebut adalah masalah empiris yang hanya bisa

\* Politik pusat: Politik di pemerintahan pusat.

\* Politik pinggir: Politik di pemerintahan DATI I, II, maupun yang lebih rendah.

\* Sekularisasi: Proses pemisahan dogma dan institusi keagamaan tertentu dari sistem pemerintahan umum.

\* Hierarki: Susunan tinggi rendah menurut penting atau tidaknya hal itu.

## Sembilan Tesis

diamati dan dinilai secara langsung.

Garis rekahan lain bisa muncul dalam masyarakat yang berbeda-beda. Walaupun begitu suatu proses koalisi parpol (lihat tesis 9) tetap harus dipupuk ketika partai politik mulai menjamur dan tidak lagi *merefiekskan*\* struktur rekahan masyarakat yang ada.

\* Refleksi: Cerminan.

## Tesis 7:

# Demokrasi Libertarian atau Demokrasi Sosial

Setelah demokrasi liberal yang berdasar pada hak azasi kemanusiaan dan kepatuhan hukum berjalan di suatu negara, rakyatnya masih bisa memilih salah satu dari dua model demokrasi, yaitu demokrasi libertarian atau demokrasi sosial.

Demokrasi libertarian berarti pengakuan hak-hak azasi sipil dan politik saja. Penganut demokrasi liberal ini percaya bahwa kebebasan diakomodasi paling baik oleh sistem ekonomi pasar bebas tanpa pembatasan harta milik pribadi. Integrasi sosial dicapai dengan berlandaskan kepercayaan pada sistem kontrak bebas.

Sebaliknya, demokrasi sosial berarti pengakuan atas kelima kategori hak azasi manusia yaitu hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sistem kenegaraan yang dianut demokrasi sosial adalah negara kesejahteraan. Sistem ini didasarkan pada hak-hak azasi tersebut



(*rights-based-welfare state*) dan di dalamnya terdapat ekonomi pasar yang terkoordinasi oleh negara beserta kelompok kepentingan dan masyarakat madani. Demokrasi kemasyarakatan menjadi pranata kelengkapannya.

Bila dua perbedaan tipe demokrasi yang sangat mendasar ini tidak terwakilkan atau ditampakkan dalam suatu sistem kepartaian, maka sistem tersebut bisa dianggap cacat dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Apalagi dalam suatu sistem kepartaian yang ramai oleh *klaim*\* dari berbagai partai keagamaan, yang menganggap ikatan agama tertentu sebagai asas tunggal platform kebijakan. Jika diteliti lebih lanjut, akan terungkap bahwa ikatan keagamaan tersebut sebenarnya juga terbuka terhadap berbagai pilihan kebijakan yang bisa didukung oleh warga negara lainnya yang memeluk agama berbeda.

\* Klaim: Tuntutan yang dasarnya masih harus diuji.

## Tesis 8:

# Masyarakat Madani

Dalam situasi tertentu, memang menjadi tujuan utama dari organisasi masyarakat madani untuk mengungkapkan profil asli dari berbagai parpol. Organisasi tersebut kemudian juga memberikan penerangan kepada para pemilih mengenai perbedaan yang nyata dari partai-partai tersebut. Sedangkan partai politik sendiri berkecenderungan untuk menutup-nutupi kepentingan dan bentuk kebijakan mereka dengan harapan mereka bisa meningkatkan dukungan dari masyarakat dan pada saat bersamaan mengurangi tingkat pertanggungjawaban mereka.

Cara yang paling efektif untuk membuat partai politik lebih bertanggung jawab kepada para pemilih mereka di luar masa pemilihan umum adalah dengan menjaga parpol di dalam lingkaran kelompok-kelompok pengaruh (*clusters of influence*). Di dalamnya kelompok kepentingan dan inisiatif masyarakat madani berinteraksi secara langsung dan terus-menerus dengan partai politik untuk mempengaruhi

## Sembilan Tesis

proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya oleh partai tersebut. Umumnya beberapa kelompok pengaruh muncul dalam masyarakat seturut dengan alur kepentingan dan nilai yang tumpang tindih antara berbagai kelompok kepentingan, parpol, dan masyarakat madani.

Tesis 9:

# Kebutuhan Pemilih untuk Mengkonsentrasikan Suara

Proses pengkonsentrasian suara pada suatu sistem kepantaraan bisa dipercepat dan ditumbuhkembangkan dengan undang-undang pemilihan umum. Batas *quorum*\* 3% atau 5% bagi partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen bisa membatasi agar partai yang dogmatis dan bertujuan tunggal tidak masuk dalam proses politik.

Hal ini juga bisa mendidik perilaku para pemilih dalam pemilu. Dengan sistem tersebut masyarakat akan belajar bahwa agar *vote*\* mereka *efektif*\* maka mereka harus

\* Quorum: Batas jumlah suara minimum yang diperoleh suatu partai politik dalam pemilu untuk bisa mendapatkan kursi di parlemen.

\* Vote: Suara/pilihan.

\* Efektif: Berdaya guna, berhasil mencapai tujuan.

mengkonsentrasikan *vote* mereka untuk partai politik yang benar-benar berkemampuan untuk mendapatkan quorum dan mendapat kursi di panlemen.

Para aktivis politik juga harus berusaha menghimpun parpol-parpol dengan profil dan kepentingan yang hampir sama. Mereka harus mempertimbangkan hal ini sebelum mendirikan pantai baru yang tampaknya melegitimasi kepentingan yang lebih mendasar dengan lebih konsekuen dibandingkan partai politik yang sudah ada. Cara lain yang bisa ditempuh adalah dengan melibatkan diri dalam pantai dengan profil yang sudah sesuai dengan pemikiran mereka. Salah satu strategi yang efektif untuk mendorong partai politik yang sudah ada agar menjadi responsif\* kepada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang muncul dari suatu masyarakat adalah dengan mendidik, memberi informasi dan penerangan kepada para pemilih.

\* Responsif: Peka dan mau menanggapi

# Kesimpulan

Apapun kritik yang dilontarkan terhadap partai politik yang ada dan sistem kepartaiannya, mereka tetaplah bagian yang tak terpisahkan dari proses demokrasi. Karena itu selain aktif dalam kegiatan masyarakat madani yang memang berlegitimasi dan berharga bagi proses demokratisasi, kita juga harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan kepekaan pantai-pantai politik terhadap pemilihnya.



## Profil Penulis

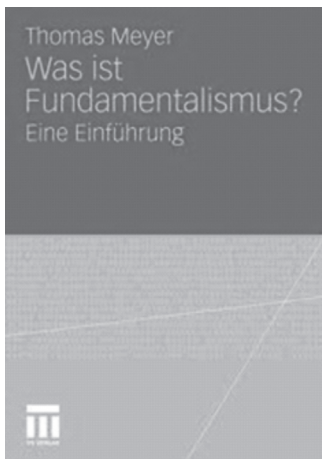
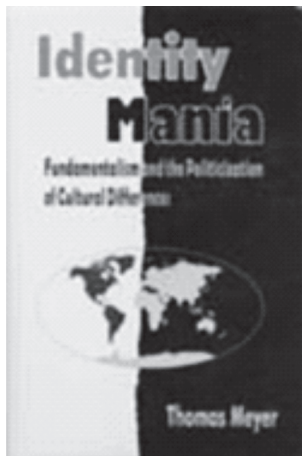
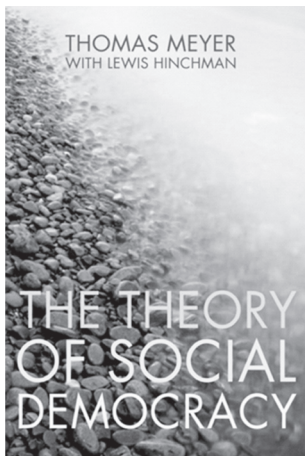
Prof. Dr. Thomas Meyer adalah Wakil Ketua Komite Penyusun Prinsip Dasar Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD). Dia pernah menjadi Direktur Akademi Politik Friedrich-Ebert-Stiftung, Yayasan Politik tertua dan terbesar di Jerman. Setelah pensiun dari tugasnya sebagai Profesor Senior Ilmu Politik di Universitas



Dortmund Jerman, sejak 2008 dia menjabat sebagai Editor Jurnal “Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte”. Buku terbarunya “Was ist Fundamentalismus? (Apa itu Fundamentalisme?) telah dicetak Penerbit Wiesbaden tahun 2011. Thomas Meyer juga menulis banyak buku diantaranya : The Concept of Social Democracy in Theory and Practice, The Theory of Social Democracy , Identity Mania.



## Sembilan Tesis







Friedrich-Ebert-Stiftung ( FES) adalah sebuah yayasan politik non-pemerintah dari Jerman, yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Yayasan ini berdirinya tahun 1925 sebagai sebuah warisan politik dari Friedrich-Ebert, Presiden pertama Jerman yang terpilih secara demokratis. Selain di Jerman FES memiliki kantor perwakilan di 90 negara dan melaksanakan kegiatan di lebih dari 100 negara termasuk Indonesia. Kantor Perwakilan di Indonesia secara resmi berdirinya sejak 1968. Sejak saat itu FES Indonesia telah menjalankan kegiatan kerjasama dengan berbagai Organisasi Non-Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat, Universitas, Lembaga Penelitian, dan Instansi Pemerintah terkait di bidang penegakan HAM, demokratisasi, pendidikan politik, fasilitasi dialog sosial, penguatan serikat pekerja, reformasi sektor keamanan, pengarusutamaan gender, dan media.

**Friedrich Ebert Stiftung**

*Kantor Perwakilan Indonesia*

Jl. Kemang Selatan II No. 2A

Jakarta 12730/INDONESIA

Telp :+62-21- 719 3711

Fax : +62-21- 7179 1358

Email : [info@fes.or.id](mailto:info@fes.or.id)

Website : [www.fes.or.id](http://www.fes.or.id)